

PROGRAM SAWIT UNTUK RAKYAT (PROWITRA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PEMBERDAYAAN, KEBERLANJUTAN, DAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT

Oil Palm Smallholder Program (Prowitra) as an Effort in Improving Productivity, Empowerment, Sustainability, and Welfare of Smallholders

Muhammad Akmal Agustira, R. Amalia, R. Nurkhoiry

*Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jln. Brigjend Katamso No. 51, Medan 20158
E-mail: agustira_akmal@yahoo.com*

ABSTRACT

Smallholder oil palm areas in Indonesia have grown rapidly in recent years. However, they are not followed by the increase in productivity. Productivity of smallholder oil palm plantation is only approximately 3.19 tons/ha, much lower than its potential that can reach 8-9 tones/ha. Therefore, Indonesia Oil Palm Research Institute (IOPRI) as the center of excellent has been conducted Smallholder Oil Palm Program (Prowitra) for increasing productivity, empowerment, sustainability, and the welfare of the oil palm smallholder. The objective this paper was to determine the condition of smallholder oil palm plantations and their constraints to achieve high productivity as well as the role of Powitra in supporting the efforts to increase productivity, empowerment, sustainability, and the welfare of the oil palm smallholder. Method used in this research was participatory rural appraisal (PRA) approach. The results of the research showed that there were four main issues in smallholder oil palm plantations, i.e., the use of illegitim seed, lack of best management practice (BMP) implementation, weak smallholder institution, and inhibition of *replanting*. In addressing the issues, Prowitra has released four activities, namely 1) socialization and increased access of high quality seed, 2) implementation of integrated and sustainable BMP, 3) institutional strengthening, and 4) replanting assistance. The key success of Prowitra implementation is knowing the problems and the needs of the smallholders. In addition, strengthening smallholder institution plays an important role in improving the effectiveness of technology dissemination, smallholder empowerment, as well as increasing productivity and the welfare of oil palm smallholders.

Keywords: *oil palm, smallholders, empowerment, Prowitra*

ABSTRAK

Perkembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perkembangan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas. Produktivitas perkebunan sawit Indonesia hanya mencapai 3,19 ton/ha dari potensinya yang mencapai 8-9 ton/ha. Pusat Penelitian Kelapa Sawit sebagai pusat unggulan iptek melakukan Program Sawit Rakyat (Prowitra) dalam upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Kegiatan Prowitra telah dilakukan di sembilan provinsi di Sumatera. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui kondisi perkebunan rakyat dan kendala pekebun rakyat mencapai produktivitas kelapa sawit, serta peranan Prowitra dalam membantu upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan perkebunan rakyat. Metode yang digunakan adalah *participatory rural appraisal* (PRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa terdapat empat permasalahan utama pada perkebunan rakyat, yaitu penggunaan benih palsu, kurangnya penerapan *best management practice* (BMP), lemahnya kelembagaan perkebunan rakyat, dan terhambatnya *replanting*. Untuk itu, Prowitra melakukan empat program kegiatan, yaitu sosialisasi dan peningkatan akses benih unggul, penerapan BMP secara terpadu dan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan pembinaan *replanting*. Kunci sukses pelaksanaan Prowitra adalah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan pekebun rakyat. Di samping itu, peran penguatan kelembagaan perkebunan rakyat sangat berperan penting dalam pengefektifan diseminasi teknologi, pemberdayaan pekebun, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun rakyat.

Kata kunci: *sawit, rakyat, pemberdayaan, Prowitra*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas pertanian strategis yang menjadi salah satu pilar bagi perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan sumber pendapatan yang sangat besar bagi

pendapatan negara melalui ekspor dan pajak serta berperan penting dalam menyumbang produk domestik bruto Indonesia. Industri kelapa sawit berperan sebagai sumber bahan baku bagi berbagai macam industri, baik pangan, *consumer goods*, oleokimia, maupun bioenergi. Di samping itu, subsektor ini sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, membuka kesempatan berusaha, serta pengembangan wilayah di berbagai daerah melalui *multiplier effect* yang berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pengembangan kelapa sawit (Agustira et al. 2008)

Pada awalnya kelapa sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Salah satu penyebabnya adalah membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan modal yang cukup besar yang hanya bisa dilakukan perusahaan (Koentjaraningrat 1997). Cikal bakal perkebunan rakyat dimulai pada tahun 1977 di mana dibentuk Pola Inti Plasma (PIR). Pola PIR ini berkembang dalam berbagai pola meliputi PIR-lokal, PIR-khusus, PIR-trans yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri maupun pemerintah melalui Departemen Pertanian. Konsepsi pola PIR tersebut merupakan pengembangan perkebunan rakyat di mana perkebunan besar sebagai inti, yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kemitraan yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (Badrun 2010). Konsepsi PIR terus berkembang dengan berbagai pola kemitraan termasuk pola KKPA dan revitalisasi (Anwar dan Herwani 2010).

Seiring dengan perkembangan waktu dan prospek kelapa sawit yang cukup menjanjikan, rakyat di sekitar perkebunan besar pun mulai dapat belajar menanam kelapa sawit secara swadaya. Hal ini menyebabkan semakin pesatnya perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 4,4 juta ha (44,11%) (Ditjenbun 2014) dan memiliki peran strategis tidak hanya bagi industri kelapa sawit Indonesia, tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pengembangan kelapa sawit. Namun, peranan perkebunan kelapa sawit tersebut masih belum optimal. Rendahnya produktivitas menjadi permasalahan utama pada perkebunan rakyat.

Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu rendahnya penggunaan benih unggul, minimnya pengetahuan pekebun rakyat mengenai kultur teknis kelapa sawit maupun lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan modal. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berbagai program di antaranya program revitalisasi perkebunan, program penggantian bibit palsu, maupun berbagai program penyuluhan perkebunan. Namun, program-program tersebut belum dirasakan secara langsung kepada pekebun rakyat. Banyak pekebun rakyat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan benih unggul dan minimnya kegiatan penyuluhan yang secara langsung dan berkala membahas permasalahan mereka dalam melaksanakan kultur teknis.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebagai salah satu pusat penelitian memiliki komitmen dalam pemantapan inovasi dan diseminasi teknologi dalam memberdayakan pekebun rakyat melalui Prowitra. Prowitra merupakan program pendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Kegiatan dari program ini meliputi diseminasi penggunaan benih unggul dan penerapan *best management practices* (BMP) untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui kondisi perkebunan rakyat dan kendala pekebun rakyat mencapai produktivitas dan keberlanjutan, serta peranan Prowitra dalam membantu upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan perkebunan rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam Prowitra adalah *participatory rural appraisal* (PRA). PRA adalah metode pendekatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat/pekebun dalam menganalisis kondisi dan permasalahan sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Chambers 1992). Metode ini tidak hanya saja meninjau, tetapi melibatkan proses dimulai dengan mengetahui permasalahan dan kebutuhan pekebun, menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan. Penelitian dilakukan selama 5 tahun dimulai dari 2011 hingga 2015.

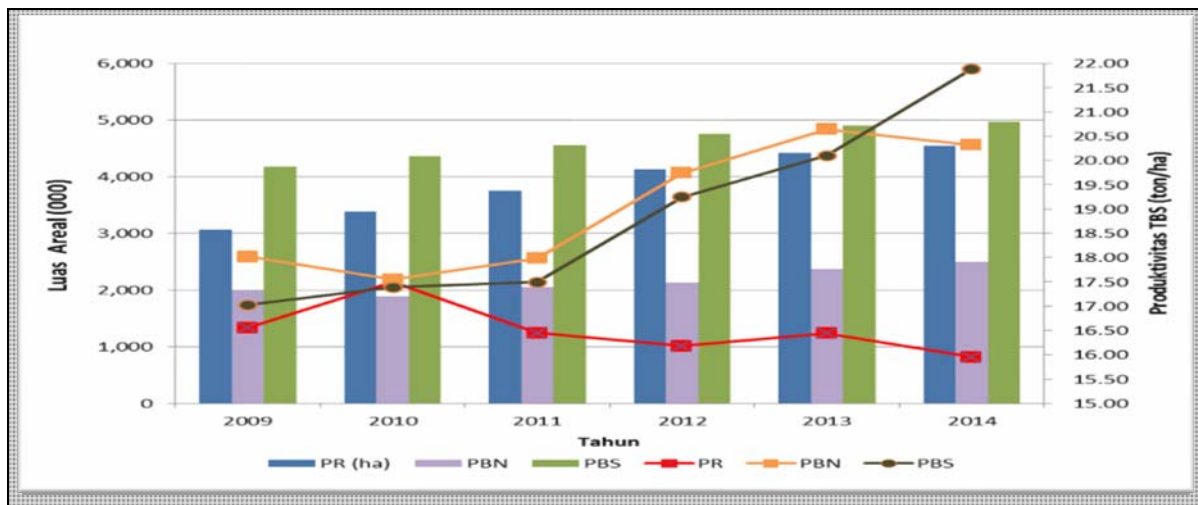
Kegiatan ini dibantu dengan mobil keliling yang melakukan kunjungan ke sentra perkebunan rakyat di seluruh Provinsi Sumatera. Contoh pekebun diambil secara sengaja (*purposive*) di setiap

provinsinya. Pengumpulan data dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD), *key informant*, dan survei. Masalah atau kondisi pekebun rakyat dianalisis melalui *cause effect analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPKS merupakan institusi yang memegang mandat nasional untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelapa sawit. Dalam tugas dan fungsinya, PPKS berkewajiban untuk menyebarkan (diseminasi) informasi dan hasil penelitiannya untuk kemajuan industri kelapa sawit. Sebagai pusat acuan teknologi di bidang perkelapasawitan, PPKS harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kelapa sawit. Permasalahan terbesar terutama pada perkebunan rakyat, yaitu masih sangat rendahnya produktivitas perkebunan rakyat dan keberlanjutan (Arifin 2014).

Berdasarkan data Ditjenbun (2014), produktivitas minyak sawit Indonesia dari perkebunan rakyat pada tahun 2014 sebesar 3,19 ton CPO/ha, jauh lebih rendah dari potensi produksi kelapa sawit yang mencapai 8–9 ton CPO/ha (Lubis 2004). Jika diasumsikan rata-rata rendemen minyak sawit nasional sebesar 20% maka estimasi produktivitas kebun kelapa sawit rakyat rata-rata pada tahun 2013 hanya sebesar 15,95 ton TBS/ha/tahun (Gambar 1). Pada kenyataannya, rendemen minyak sawit untuk perkebunan rakyat banyak yang tidak mencapai 20%. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah sehingga pengembangan kelapa sawit rakyat di sentra perkebunan kelapa sawit belum optimal dalam peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, implikasi lain adalah terdapat kecenderungan penambahan areal kelapa sawit terutama pada lahan marginal seperti lahan gambut, pasang surut, dan berbukit yang tentunya jauh dari penerapan kelapa sawit yang berkelanjutan.



Sumber: Ditjenbun (2014), diolah

Gambar 1. Perkembangan luas areal dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 2009–2014

Sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh PPKS yaitu meluncurkan Program Sawit Rakyat (Prowitra) pada tahun 2010. Prowitra adalah program pendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas melalui sosialisasi dan diseminasi teknologi penerapan kultur teknis yang tepat dan berkesinambungan melalui pendekatan dan pemberdayaan petani secara partisipatif (PRA), yaitu proses pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara partisipatif terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan secara nyata (Alam 2012). Nilai program ini didasarkan pada sikap melayani, mendidik, dan mendampingi. Moto Prowitra ialah PPKS datang petani senang. Nilai dan moto Prowitra ini memiliki arti bahwa semua kegiatan PPKS bersifat melayani apa saja yang menjadi permasalahan pekebun rakyat secara partisipatif, mendidik pekebun rakyat secara mandiri, dan mendampingi dalam pemberdayaan. Saat ini PPKS telah melakukan 82 kegiatan di 9 provinsi (Tabel 1).

Tabel 1. Pelaksanaan Prowitra, 2010–2015

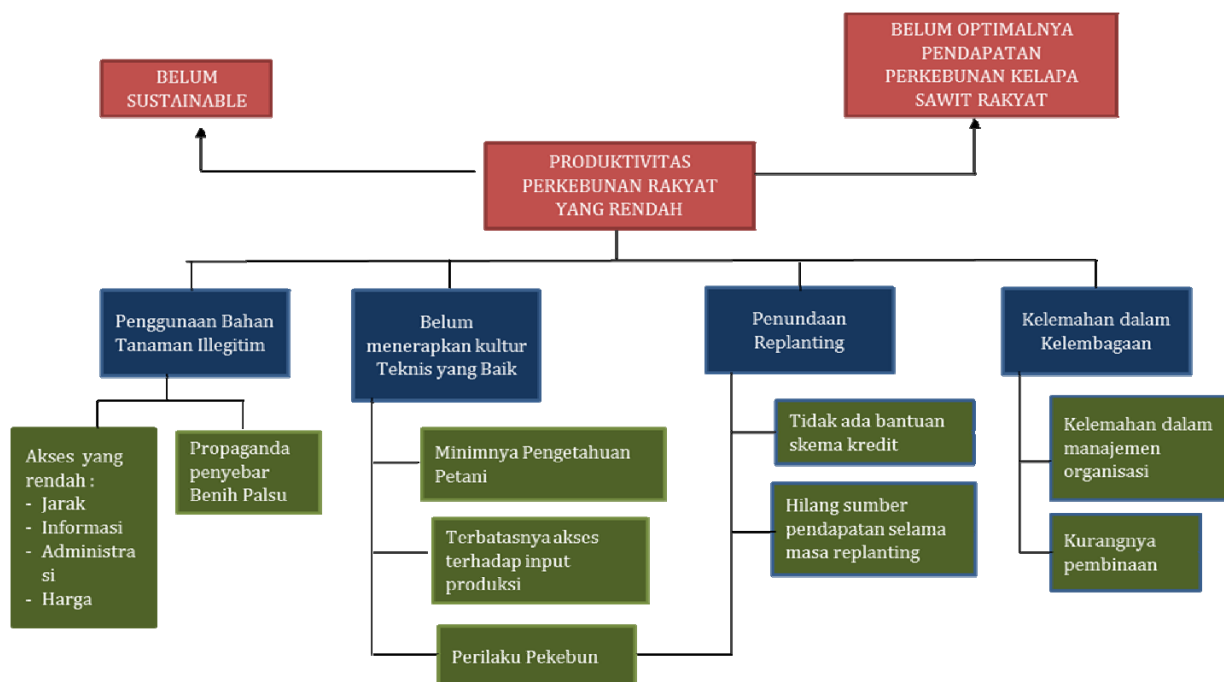
Provinsi	2015 ^a	2014	2013	2012	2011	2010	Jumlah
Aceh	3	2	8	4	6	1	24
Sumut	-	2	2	-	1	-	5
Sumbar	2	1	4	4	3	-	14
Riau	3	2	2	1	-	-	8
Jambi	4	1	2	2	3	-	12
Bengkulu	1	1	2	2	2	1	9
Lampung	-	-	-	1	1	-	2
Sumsel dan Babel	5	3	-	-	-	-	8
Jumlah	18	12	16	14	16	2	82

Sumber: PPKS (2015)

Keterangan: ^a Sampai Oktober 2015

Permasalahan Rendahnya Produktivitas dan Keberlanjutan pada Perkebunan Rakyat

Berdasarkan hasil kajian PRA, terdapat empat permasalahan utama rendahnya produktivitas kelapa sawit rakyat di Indonesia (Gambar 2), yaitu penggunaan bahan tanaman palsu (ilegitim), rendahnya penerapan kultur teknis, perlambatan *replanting*, dan lemahnya institusi/kelompok tani.



Gambar 2. Permasalahan utama pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia, 2015

Penggunaan Bahan Tanaman Palsu

Bahan tanaman merupakan faktor penting bagi produksi kelapa sawit. Walaupun nilai bahan tanaman hanya 3% dari faktor produksi, akan tetapi memberi dampak yang besar dalam ± 25 tahun ke depan (Agustira dan Amalia 2012). Temuan di sentra perkebunan rakyat di beberapa provinsi contoh menunjukkan 60% bahan tanaman yang digunakan oleh perkebunan rakyat di Indonesia bersumber dari bahan tanaman ilegitim dan 90%-nya merupakan petani swadaya. Penggunaan bahan tanaman yang rendah kualitasnya tersebut berdampak pada produksi yang tidak optimal. Potensi produksi

tanaman dengan bibit asalan hanya sebesar 10–12 ton TBS/ha/tahun (Lubis 2004), dengan potensi rendemen minyak rendah (16%). Akibatnya, kebun tidak dapat menopang kehidupan petani karena produktivitas rendah dan pengembalian kredit terhambat. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) di mana PKS bekerja di bawah kapasitas sehingga biaya olah tinggi.

Maraknya bahan tanaman palsu di kalangan perkebunan rakyat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya 1) kurangnya informasi mengenai pentingnya penggunaan bahan tanaman unggul kepada pekebun; 2) jauhnya sumber benih dengan lokasi perkebunan masyarakat; 3) harga bahan tanaman ilegal yang lebih rendah; 4) propaganda pemalsu bahan tanaman kelapa sawit; serta 5) timbulnya kesan bahwa adanya kesulitan dalam persyaratan administrasi pembelian kecambah langsung dari produsen benih.

Penerapan Kultur Teknis yang Tidak Tepat

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan rakyat di Indonesia adalah penerapan kultur teknis yang tidak tepat. Beberapa penyebab penerapan kultur teknis yang tidak tepat, yaitu 1) minimnya pengetahuan pekebun sawit; 2) akses pekebun rakyat terhadap input produksi; dan 3) perilaku pekebun rakyat.

1. Minimnya pengetahuan pekebun sawit

Terbatasnya pengetahuan pekebun rakyat tidak hanya dalam pemeliharaan tanaman, namun sejak awal pembangunan kebun. Banyak pekebun rakyat yang tidak tahu dan tidak juga memerhatikan kesesuaian lahan sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal, produktivitas rendah, mengganggu lingkungan, serta menghilangkan potensi ekonomi tanaman lainnya. Areal perkebunan rakyat banyak dijumpai pada areal dengan kemiringan yang curam, lahan gambut yang dalam, serta banyaknya konversi lahan pangan menjadi kebun kelapa sawit. Selain itu, penerapan kultur teknis juga terjadi pada pemeliharaan tanaman di antaranya

- a. pemupukan yang tidak seimbang (tidak menerapkan 4T: tepat jenis, tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktu);
- b. pengendalian gulma, yaitu pelaksanaan *clean weeding* yang mengakibatkan pupuk tidak terserap dengan baik dan hilangnya inang bagi predator hama kelapa sawit sehingga biaya pengendalian hama tinggi, kurangnya perawatan piringan/gawangan, lebar, dan kondisi piringan tidak standar;
- c. pekebun tidak menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) dan lebih mengandalkan bahan kimia. Selain itu, lemahnya *early warning system* (EWS) terhadap serangan hama dan penyakit juga menjadi kendala dalam perkebunan rakyat;
- d. penunasan yang kurang, bahkan berlebihan;
- e. tidak adanya kastrasi sehingga pertumbuhan vegetatif tanaman tidak optimal;
- f. tidak adanya konsolidasi pada tanaman rusak/abnormal;
- g. kendala dalam hal panen, yaitu tidak memerhatikan kriteria kematangan (buah mentah sudah dipanen maupun buah busuk dikarenakan terlambat panen) yang berpengaruh terhadap rendemen;
- h. konservasi lahan dan air yang tidak diperhatikan, tidak adanya pemeliharaan tapak kuda, tapak timbun, parit/drainase, serta pembangunan teras kontur yang tidak sesuai;
- i. panen tidak memerhatikan kriteria kematangan (buah mentah sudah dipanen maupun buah busuk dikarenakan terlambat panen) yang berpengaruh terhadap rendemen.

Minimnya pengetahuan petani disebabkan minimnya kegiatan penyuluhan yang menyentuh langsung pekebun rakyat, bimbingan, dan konsultasi teknis. Minimnya kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi oleh dinas terkait terutama Dinas Perkebunan dan Balai Penyuluhan Pertanian disebabkan minimnya dana operasional, terbatasnya kualitas, dan kuantitas penyuluh pertanian.

2. Akses pekebun rakyat terhadap input produksi

Permasalahan yang dihadapi terhadap rendahnya akses pekebun rakyat terhadap input produksi di antaranya: a) daya beli rendah terhadap input produksi, dikarenakan produksi TBS masih rendah, lahan yang diusahakan terbatas, serta kurangnya manajemen keuangan usaha tani; b) perbedaan harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar; c) kualitas pupuk rendah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pupuk yang berkualitas; d) peredaran pupuk palsu dengan kandungan hara yang jauh di bawah dosis standar; dan e) beredarnya berbagai pupuk majemuk yang menjanjikan kenaikan produksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Perilaku pekebun rakyat

Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat tidak lepas dari karakteristik usaha tani kecil. Karakteristik usaha tani kecil adalah sebagai berikut (Mawardi 2012): a) volume penjualan, jumlah pekerja, dan keuntungan kotor relatif kecil; b) modal usaha biasanya berasal dari perorangan, kelompok kecil, dan rumah tangga; c) pengelolaan usaha kurang berorientasi pada pengembangan usaha; d) penguasaan iptek dan inovasi baru kurang; e) posisi tawar dan persaingan rendah; f) pemilik sering merangkap sebagai pekerja dalam berusaha; dan g) wilayah operasi dan *networking* sangat terbatas.

Karakteristik usaha tani tersebut didorong atas perilaku pekebun kelapa sawit rakyat yang masih cenderung dengan pola pikir subsisten dibandingkan komersial (Syahza 2012). Tantangan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada perkebunan kelapa sawit rakyat, yaitu segi perilaku petani di mana dapat dilihat dari a) perubahan lapangan usaha ekstraktif ke usaha budi daya; b) budaya konsumtif di tingkat petani dan lemah dalam pengelolaan keuangan usaha tani; c) tingkat pendidikan dan usia pekebun rakyat menyebabkan kurangnya respons pekebun terhadap inovasi dan adaptasi teknologi yang rendah; d) kurangnya inisiatif petani dalam melakukan pemeliharaan sesuai dengan *best management practices*; dan e) rendahnya kesadaran pekebun rakyat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Terhambatnya Replanting Perkebunan Rakyat

Perkebunan kelapa sawit rakyat berkembang seiring dengan perkembangan perkebunan besar yang ada di Indonesia sejak akhir tahun 70-an dan awal 80-an sehingga sebagian telah berumur lebih dari 25 tahun dan memerlukan *replanting* (peremajaan). *Replanting* tanaman tua diperlukan untuk memperbaiki produktivitas yang umumnya sudah menurun tajam. Namun, berbagai permasalahan menyebabkan *replanting* perkebunan rakyat terhambat. Permasalahan utama *replanting* yang dihadapi oleh perkebunan rakyat di Indonesia di antaranya pemenuhan kebutuhan hidup selama tanaman belum menghasilkan saat *replanting* dan besarnya kebutuhan biaya investasi untuk *replanting* tanaman. Permasalahan *replanting* khususnya PIR juga disebabkan hubungan kemitraan yang berjalan kurang baik, seperti terkait dengan transparansi pengelolaan kemitraan, kurangnya komitmen dalam pemasaran TBS, pembinaan, pengelolaan kredit (Agustira dan Amalia 2012). Terkait dengan pendanaan untuk membantu pembiayaan investasi *replanting* terkendala dengan administrasi kredit seperti sertifikat lahan seperti yang berpindah tangan kepemilikan ataupun diagunkan, serta tidak ada penjamin terhadap kredit yang diberikan.

Kelemahan dalam Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian pada lokasi perkebunan rakyat di beberapa provinsi contoh, tidak jarang ditemui kelompok tani yang tidak aktif dan hanya sebagai sarana penyalur bantuan atau subsidi dari pemerintah dan perusahaan kepada pekebun rakyat. Kelompok tani yang tidak aktif tersebut didorong karena beberapa faktor, di antaranya kemampuan manajemen dan usaha anggota kelompok tani yang lemah, faktor sumber daya manusia (kurangnya pengetahuan tentang organisasi yang baik dan kebergantungan terhadap tokoh masyarakat), serta jaringan kerja sama anggota melemah (tidak ada kegiatan bersama, pemecahan masalah secara individu, serta kepercayaan anggota ke pengurus atau sesama pekebun yang semakin lemah). Dengan tidak aktifnya kelompok tani, permasalahan teknis dalam berkebun yang seharusnya dapat diselesaikan secara bersama menjadi penyelesaian secara individu dengan keterbatasan sumber daya petani tersebut.

Peranan Prowitra dalam Upaya Peningkatan Produktivitas, Pemberdayaan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Perkebunan Rakyat

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia maka dilakukan beberapa peranan dalam pelaksanaan kegiatan Prowitra, yaitu 1) sosialisasi dan peningkatan akses terhadap bahan tanaman unggul; 2) diseminasi *best management practices*; 3) peningkatan kemampuan institusi dan pemberdayaan pekebun rakyat; dan 4) pembinaan terhadap peremajaan.

Sosialisasi dan Peningkatan Akses terhadap Bahan Tanaman Unggul

Penyelesaian masalah maraknya penggunaan benih unggul adalah melalui program sosialisasi penggunaan dan mempermudah akses pekebun rakyat dalam memperoleh benih unggul. Program kegiatan tersebut terdiri dari

1. Mobil keliling

Kegiatan mobil keliling dilakukan seiring dengan kegiatan Prowitra pada sentra perkebunan rakyat secara periodik 3–6 bulan sekali. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempermudah akses pekebun rakyat memperoleh benih unggul dan memberikan informasi yang benar tentang benih unggul sehingga secara tidak langsung memberantas peredaran benih palsu. Mobil keliling ini telah menjangkau seluruh provinsi di Sumatera dengan jumlah kecambah sawit yang tersebar mencapai 1.692.650 butir (Tabel 2). Dengan penggunaan kecambah kelapa sawit 200 butir/ha maka Prowitra telah membantu penggunaan benih unggul oleh pekebun rakyat mencapai 8.463 ha. Capaian tersebut belum memperhitungkan dampak *multiplier* sosialisasi dengan pemesanan dan pembelian benih unggul secara langsung oleh pekebun rakyat ke PPKS.

Tabel 2. Penyebaran benih unggul melalui kegiatan mobil keliling Prowitra di Sumatera, 2011–2015

No.	Provinsi	Jumlah KKS (butir)					Jumlah total
		2011	2012	2013	2014	2015 ^a	
1.	Aceh	25.513	89.500	62.521	114.324	63.779	355.637
2.	Sumatera Utara	5.021	-	-	56.146	-	61.167
3.	Riau	-	-	4.097	95.364	130.742	230.203
4.	Sumatera Barat	5.119	64.219	85.170	111.959	146.271	412.738
5.	Jambi	18.320	38.633	2.538	93.241	229.123	381.855
6.	Bengkulu	5.727	8.163	10.250	13.240	25.764	63.144
7.	Lampung	-	5.124	-	-	-	5.124
8.	Bangka Belitung	-	-	-	76.873	105.909	182.782
Total (butir)		59.700	205.639	164.576	561.147	701.588	1.692.650

Sumber: PPKS (2015)

a. Mempermudah administrasi pembelian oleh pekebun rakyat dan potongan harga

Permasalahan utama pekebun rakyat yang telah mengetahui lokasi pembelian benih unggul adalah adanya kesan administrasi pembelian yang sulit dan pembelian yang harus dalam partai besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, PPKS sebagai salah satu produsen benih unggul memberikan kemudahan administrasi kepada pekebun rakyat. Persyaratan pembelian hanya dengan melampirkan fotokopi surat keterangan lahan dan KTP, sedangkan untuk jumlah pembelian dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekebun rakyat untuk 1 ha (200 butir). Di samping itu, PPKS memberikan potongan harga sebesar 10% bagi pekebun rakyat.

b. Waralaba bibit

Waralaba bibit bertujuan untuk mempermudah akses pekebun rakyat dalam memperoleh bibit unggul terutama pada sentra pengembangan perkebunan rakyat yang tidak terjangkau mobil keliling. Program waralaba ini pekebun rakyat atau kelompok tani melakukan penggunaan benih unggul PPKS, mendapat pelayanan bantuan teknis dan konsultasi dari PPKS, dan berhak meminjam nama PPKS dalam pemasaran bibit. Program ini merupakan salah satu peranan Prowitra dalam pemberdayaan pekebun rakyat melakukan pembibitan.

c. Pemberdayaan pembibitan perkebunan rakyat

Banyak program bantuan bibit unggul yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan perkebunan dalam bentuk CSR kurang efisien terkait dengan harga yang disebabkan biaya angkut yang mahal, rentan penyelewengan dan tidak memberdayakan pekebun rakyat karena menerima bibit siap tanam. Untuk memberdayakan pekebun rakyat PPKS melakukan pemberdayaan pembibitan pekebun rakyat. Salah satu kegiatannya adalah dengan program pengadaan benih unggul di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dinas Perkebunan Pasaman Barat melakukan program bantuan bibit unggul dan penggantian benih unggul dalam bentuk kecambah kepada kelompok tani untuk dilakukan pembibitan. Di samping itu, dinas perkebunan tersebut juga bekerja sama dengan perusahaan perkebunan memberikan bantuan benih untuk dibibitkan. Dalam hal ini PPKS sebagai pendamping dan pembinaan terhadap teknis pembibitan.

d. Outlet Ruko

Outlet ruko kecambah PPKS bertujuan untuk mempermudah akses pekebun rakyat dalam membeli kecambah pada sentra perkebunan rakyat yang sangat jauh dari produsen benih kelapa sawit. Outlet ruko ini tidak hanya menjual, tetapi sekaligus sebagai tempat konsultasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekebun rakyat. Saat ini terdapat dua ruko outlet PPKS, yaitu di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan Lao Bakung Samarinda Kalimantan Timur.

2. Diseminasi *best management practices* yang berkelanjutan

a. Program diseminasi dan sosialisasi penggunaan BMP secara berkala

Program ini dilakukan secara berkala 3–6 bulan secara berkala pada sentra perkebunan rakyat. Kegiatan seiring dengan kegiatan mobil keliling prowitra. Dalam materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan kendala dalam penerapan BMP. Dengan penyampaian apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan pekebun, kegiatan diseminasi akan berjalan efektif. Tim Prowitra mengevaluasi apa yang menjadi permasalahan dan kendala pekebun rakyat dalam penerapan BMP dan menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat.

b. Penerapan demonstrasi blok (demblok)

Program diseminasi secara berkala akan dilengkapi dengan penerapan demonstrasi blok. Metode ini merupakan salah satu metode efektif dalam kegiatan diseminasi (Rokayah et al. 2006). Demonstrasi merupakan suatu metode diseminasi di lapangan dengan memperlihatkan/membuktikan secara nyata tentang cara atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan petani (Musyafak dan Tatang 2005). Prowitra menerapkan sistem demonstrasi blok yaitu memberikan contoh bagi pekebun sekitarnya untuk menerapkan teknologi pada area yang berada di sekitar sentra perkebunan rakyat untuk memberikan contoh bagi pekebun rakyat di sekitarnya. Contoh penerapan demblok adalah di Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasera, Provinsi Sumatera Barat seluas 2,5 ha pada tahun 2012. Penerapan BMP untuk peningkatan produktivitas dan penerapan kultur teknis yang berkelanjutan.

c. *Training for trainer* bagi penyuluh pertanian

Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian, kegiatan Prowitra melakukan berbagai program *training for trainer* penyuluh pertanian di berbagai daerah di Sumatera Utara, Riau, dan

Sumatera Barat. Hal ini menunjang kesinambungan kegiatan penyuluhan di berbagai sentra perkebunan kelapa sawit.

d. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan pemberdayaan pekebun rakyat

Kelembagaan berupa kelompok tani ataupun KUD merupakan perwujudan pertanian terkonsolidasi sehingga bisa memproduksi secara optimal dan efisien. Melalui kelembagaan pekebun/petani sawit pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan permodalan dapat dilakukan secara bersama (Nuryanti dan Dewa 2011). Melalui institusi kelompok tani diseminasi teknologi akan lebih efisien karena dapat menjangka pekebun yang lebih banyak dalam satuan waktu tertentu. Melalui penguatan institusi akan mengefektifkan pemberdayaan pekebun, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pekebun melalui beberapa program yang difasilitasi oleh instansi pemerintah ataupun perusahaan (Hermanto 2007). Oleh karena itu, pelaksanaan Prowitra mementingkan penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan melalui Prowitra dilakukan dengan program desa binaan. Program ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan pekebun rakyat. Desa binaan Prowitra yang telah dilakukan pada tahun 2011 di Bengkulu, yaitu Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Desa Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Program desa binaan ini telah berhasil membantu pekebun rakyat di Bengkulu melakukan *replanting* melalui penerapan *best management practices* (BMP) secara terpadu. Desa binaan lainnya terdapat di Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasera, Sumatera Barat pada tahun 2012. Desa binaan ini telah menjadi program percontohan bagi pengembangan kelapa sawit di desa sekitarnya.

e. Pembinaan dalam proses peremajaan

Saat ini sebagian perkebunan rakyat terutama perkebunan rakyat program PIR telah memasuki usia yang memerlukan peremajaan (*replanting*). Berdasarkan hasil kajian, saat ini perkebunan eks-PIR mengalami kesulitan untuk *replanting*. Hal ini disebabkan berbagai faktor mulai dari hubungan kemitraan dengan inti yang kurang harmonis, tidak adanya modal untuk *replanting*, hingga terkendala kekhawatiran hilang pendapatan pada saat masa *replanting* (Bakir 2007). Untuk itu, Prowitra melakukan pembinaan *replanting* bagi pekebun rakyat. Program pembinaan dilaksanakan di Desa Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Desa Babatan, Kabupaten Seluma. Masing-masing desa dilakukan demonstrasi blok 20 ha. Desa Giri Mulya dibangun dengan metode 60% ditumbang dan 40% dibiarkan sampai dengan umur tanaman yang ditanam kembali berumur 34 bulan, sedangkan di Desa Seluma dilakukan dengan tumbang serempak. Berdasarkan hasil kajian tersebut, hasil di Desa Giri Mulya dengan metode 60 : 40 berhasil lebih baik dibandingkan dengan Desa Seluma dengan metode tumbang serempak. Beberapa indikator hal tersebut bukan terkait dengan masalah teknis, namun lebih disebabkan terkait dengan faktor kelembagaan pekebun rakyat. Faktor kelembagaan yang kuat sangat berpengaruh dalam kegiatan *replanting* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan merupakan cara efektif dalam pemberdayaan pekebun, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pekebun melalui suatu program.

KESIMPULAN

Prowitra sebagai sarana diseminasi teknologi penelitian dari PPKS dapat dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Kunci sukses pelaksanaan Prowitra adalah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan pekebun rakyat. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat empat permasalahan utama dalam perkebunan kelapa sawit rakyat, yaitu penggunaan benih palsu, kurangnya penerapan kultur teknis, penundaan *replanting*, dan lemahnya kelembagaan pekebun rakyat. Untuk itu, peranan Prowitra difokuskan pada pendekatan akses bahan tanaman, peningkatan akses informasi teknologi, peningkatan pemberdayaan pekebun rakyat melalui penguatan kelembagaan, dan jejaring usaha. Dengan demikian, diharapkan Prowitra dapat berperan efektif dalam upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan pekebun, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustira MA, Kurniawan A, Dja'far, Siahaan D, Wahyono T. 2008. Tinjauan ekonomi industri kelapa sawit. Medan (ID): Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Agustira MA, Rizki A. 2012. Kendala peningkatan produktivitas pada perkebunan kelapa sawit rakyat. *Warta PPKS*. 17(1):12-17.
- Alam A, Sabir I. 2012. Role of participatory rural appraisal in community development. *IJARBS*. 2(8):25-38.
- Arifin B. 2014. Peranan kemitraan dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan. Diskusi publik kemitraan perusahaan kelapa sawit dengan petani plasma untuk peningkatan ekonomi nasional [Internet]. [diunduh 2015 Nov 8]. Tersedia dari: <http://www.perhepi.org/wp-content/upload/2014.pdf>
- Badrun M. 2010. Tonggak perubahan: melalui PIR kelapa sawit membangun negeri. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bakir LH. 2007. Kinerja Perusahaan Inti Rakyat kelapa sawit di Sumatera Selatan: analisis kemitraan dan ekonomi rumah tangga petani [disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Chambers R. 1992. Rural appraisal: rapid, relaxed, and participatory. IDS discussion paper 331 [Internet]. [cited 2012 May 29]. Available from: <http://opendocs.ids.ac.uk>.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Statistik perkebunan kelapa sawit 2012-2013. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Hasan N. 2009. Strategi penguatan kelompok tani dalam pengembangan usaha (kasus Kelompok Tani Karya Agung Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.
- Hermanto. 2007. Rancangan kelembagaan tani dalam implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan. *AKP*. 5(20):110-125.
- Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan, mentalitas dalam pembangunan. Jakarta (ID): Gramedia.
- Musyafak A. 2005. Strategi percepatan adopsi dan difusi inovasi pertanian mendukung Prima Tani. *AKP*. 3(1):20-37.
- Nuryanti S, Swastika DKS. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. *FAE*. 29(2):115-128.
- Rokayah E, Susi M, Sukmayana. 2006. Diseminasi melalui demonstrasi penerapan pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu padi. Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Syahza A. 2012. Buku ajar ekonomi sumber daya manusia dan alam. Riau (ID): Pusbandik UNRI.